KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN I 2020

Penyusun:
Penanggung Jawab: Tri Budhianto. Ketua Tim: Benedictus Didik Ariwibawa. Editor: Bachrul Ulum. Anggota: Heru Cahyono, Nengah Wardana, Syamsu Mukmin, Metriyani, Sidikarya, Ari Sasuko

KANWIL DIT PERBENDAHARAAN PROVINSI E

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... *i*
DAFTAR GRAFIK ..... *ii*
DAFTAR TABEL ..... *iii*

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL **1**
A. Produk Domestik Regional Bruto 1
B. Inflasi 2
C. Indikator Kesejahteraan 2
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN **6**
A. Pendapatan Negara 6
B. Belanja Negara 9
C. Prognosis Realisasi APBN 10
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD **11**
A. Pendapatan Daerah 12
B. Belanja Daerah 14
C. Prognosis Realisasi APBD 15
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) **16**
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 16
B. Pendapatan Konsolidasian 16
C. Belanja Konsolidasian 18
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 19
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH **21**
A. Pariwisata Bali Lesu Akibat Covid19, Pendapatan Pelaku Wisata Turun 21
B. Triwulan I 2020 Ekonomi Bali Tumbuh Negatif 22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1
Grafik 1.2.	Perkembangan Inflasi	1
Grafik 1.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3
Grafik 1.4.	Persentase Penduduk Miskin	4
Grafik 1.5	Jumlah Penduduk Miskin	4
Grafik 1.6	Indeks Pembangunan Manusia	5
Grafik 2.1.	Realisasi Penerimaan Perpajakan	7
Grafik 2.2.	Realisasi Penerimaan Bukan Pajak	8
Grafik 2.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	9
Grafik 2.4.	Realisasi Belanja Transfer dan Dana Desa	10
Grafik 3.1.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	12
Grafik 3.2.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	12
Grafik 3.3.	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13
Grafik 3.4.	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Aslil Daerah Yang Sah	13
Grafik 3.5	Realisasi Dana Perimbangan	14
Grafik 3.6.	Realisasi Belanja Daerah	14
Grafik 3.7.	Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan	15
Grafik 4.1.	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Lingkup Provinsi Bali	17
Grafik 4.2.	Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Bali	17
Grafik 4.3.	Perubahan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian	17
Grafik 4.4.	Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Bali	18
Grafik 5.1.	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Hunian Hotel	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bali Triwulan I 2020	6
Tabel 3.1	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bali Triwulan I 2020	11
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bali Triwulan I 2020	16
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Bali Triwulan I 2020	19
Tabel 4.3	Rasio Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Bali	20
Tabel 4.4	Laporan Operasional Triwulan I 2020	19
Tabel 4.5	Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB	20
Tabel 4.6	Kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB	20
Tabel 4.7	Kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB	20
Tabel 5.1	Kenaikan/Penurunan Lalu Lintas Transportasi Udara dan Laut, Penumpang, dan Barang	23
Tabel 5.2	Penyaluran KUR-UMi Menurut Sektor Ekonomi	24

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Gambar: Alat Musik Gender

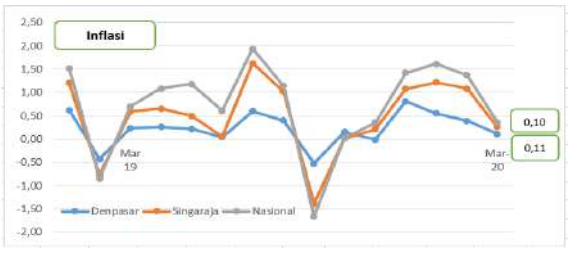

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Ekonomi Bali triwulan I-2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp. 60,60 triliun dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp. 38,65 triliun.

Jika dibandingkan triwulan I 2019 (y-on-y), ekonomi Bali triwulan I-2020 tercatat tumbuh negatif 1,14 persen. Pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan negatif terdalam tercatat pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yakni -9,11 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Impor Luar Negeri tercatat sebagai komponen dengan pertumbuhan negatif terdalam, yaitu sebesar -38,81 persen.

Secara q-to-q (dibandingkan dengan triwulan sebelumnya), ekonomi Bali triwulan I-2020 juga mencatatkan angka pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar -7,67 persen. Menurut lapangan usahanya, pertumbuhan negatif terdalam juga tercatat pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yaitu -15,12 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif terdalam dicatatkan Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) sebesar -42,61 persen.

Struktur ekonomi Bali pada triwulan I-2020 tercatat masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi sebesar 21,81 persen. Sementara kontribusi terbesar dari sisi pengeluaran adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan sumbangan sebesar 51,44 persen.

Grafik 1.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS, diolah

B. Inflasi

Pada bulan Maret 2020 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,11 persen yang ditunjukkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK 2018=100) sebesar 104,76. Sementara itu, tingkat inflasi tahun berjalan Maret 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2020 terhadap Maret 2019 atau YoY) tercatat masing-masing setinggi 1,07 persen dan 2,95 persen. Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Maret 2020 antara lain, canang sari, emas perhiasan, mangga, daging ayam ras, kue kering berminyak, telur ayam ras, sawi hijau, sawi putih, pisang, dan kopi bubuk.

Pada bulan Maret 2020 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 0,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK 2018=100) sebesar 105,22. Tingkat inflasi tahun kalender Maret 2020 setinggi 1,53 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2020 terhadap Maret 2019 atau YoY) tercatat setinggi 3,69 persen. Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Maret 2020 antara lain, ongkos binatu/laundry, telur ayam ras, terong, minyak goreng, kangkung, canang sari, ikan tongkol, tauge, tarif dokter spesialis dan emas perhiasan.

Grafik 1.2
Perkembangan Inflasi

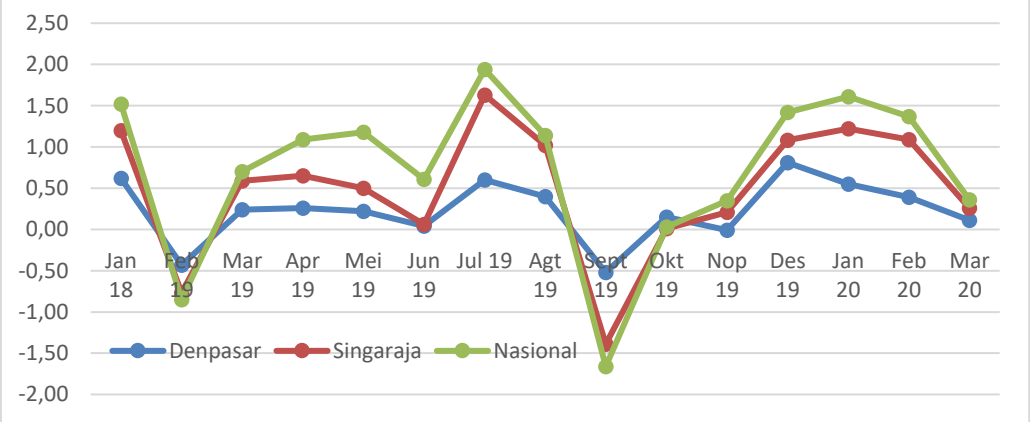

Sumber: BPS, diolah

C. Indikator Kesejahteraan

1. Tingkat Pengangguran

Pada Februari 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 1,21 persen, meningkat 0,02 persen dibandingkan TPT Februari 2019 yang tercatat sebesar 1,19 persen, ditandai dengan bertambahnya 1.065 orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat Pendidikan lain, yaitu sebesar 3,77 persen.

Pada periode Februari 2019-Februari 2020, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama ada pada Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 1,01 persen; Kategori R, S, T, U (Jasa Lainnya) sebesar 0,63 persen; dan Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) serta Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial) masing-masing sebesar 0,57 persen. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) -2,05 persen; Kategori I (Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum) sebesar -0,88 persen; serta Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) sebesar -0,72 persen.

Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka

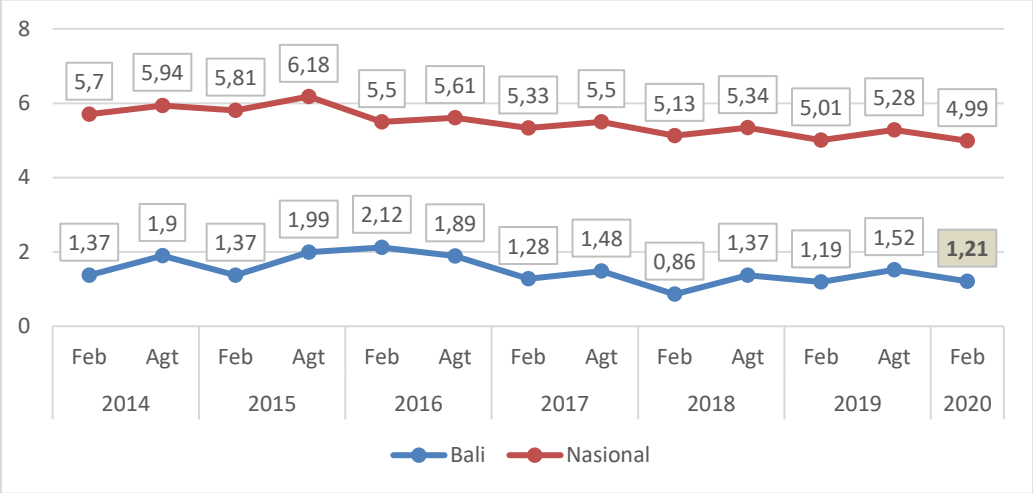

Sumber: BPS, diolah

2. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2019 tercatat sebesar 3,61 persen, turun sedalam -0,18 poin persen disandingkan dengan posisi Maret 2019. Selama periode Maret - September 2019, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan, bersamaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 3,29 persen pada Maret 2019 menjadi 3,04 persen pada September 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga mengalami penurunan dari 4,88 persen pada Maret 2019 menjadi 4,86 persen pada September 2019.

Grafik 1.4
Persentase Penduduk Miskin

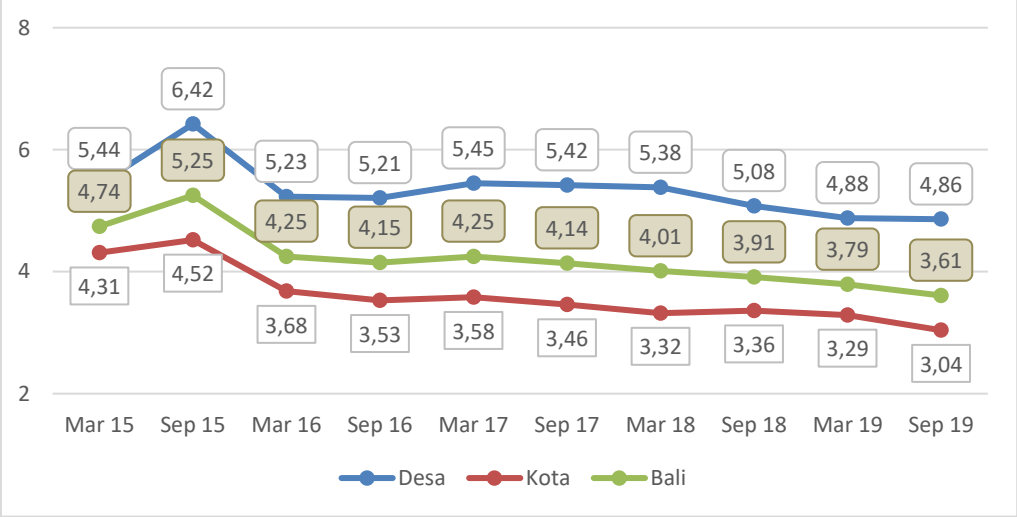

Sumber: BPS, dioalah

Jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan September 2019 tercatat sekitar 156,91 ribu orang. Jumlah ini mengindikasikan penurunan sekitar 6,9 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 yang tercatat sekitar 163,85 ribu orang. Garis Kemiskinan tercacat naik sekitar 3,07 persen, yaitu dari Rp 400.624 per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 412.906 per kapita per bulan pada September 2019. Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat mengalami penurunan sedalam -0,031 poin persen, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan sedalam -0,011 poin persen. Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Gini ratio sedikit mengalami kenaikan dari 0.366 di Maret 2019 menjadi 0.370 di September 2019. Kenaikan gini ratio pada periode September 2019 sekitar 0,004 poin persen dari periode Maret 2019

Grafik 1.5
Jumlah Penduduk Miskin

Sumber: BPS,diolah

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tercatat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Bali tercatat 75,38. Angka ini lebih tinggi 0,61 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibanding keadaan tahun 2018. Bayi yang lahir pada tahun 2019 tercatat memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,99 tahun, lebih panjang 0,31 tahun dibandingkan keadaan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun tercatat memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan keadaan tahun 2018. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata tercatat telah menempuh pendidikan selama 8,84 tahun, lebih lama 0,19 tahun dibandingkan keadaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, masyarakat Bali tercatat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 14,15 juta rupiah per tahun, meningkat 260 ribu.

Grafik 1.6
Indeks Pembangunan Manusia

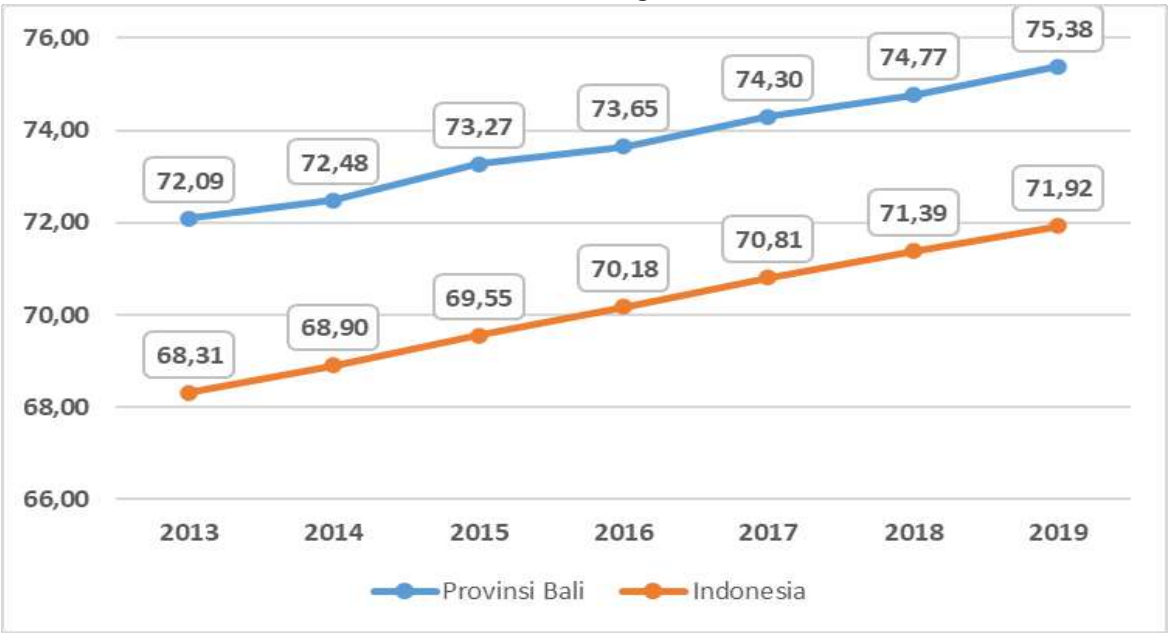

Sumber: BPS, diolah

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Gambar: Tari Barong Landung

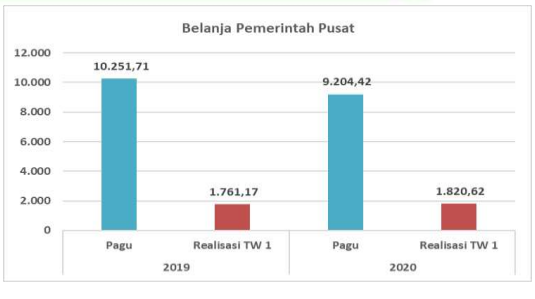

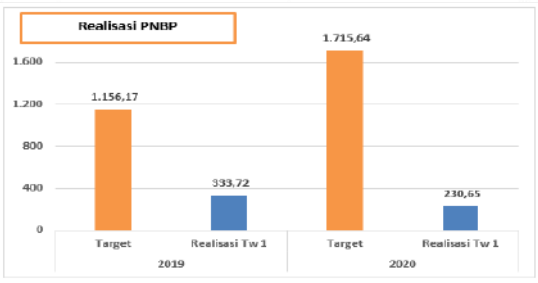

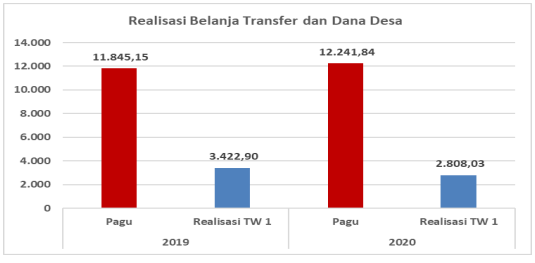

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

A. Pendapatan Negara

Target Pendapatan tahun 2020 tercatat sebesar Rp16.599,71 miliar, naik sebesar 21,78% dari pagu tahun 2019 disebabkan naiknya target penerimaan pajak yang dilatarbelakangi upaya optimalisasi bidang perpajakan dengan target yang realistis berdasarkan basis data terkini. Data-data tersebut meliputi pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2019 yang sebesar 15%, adanya upaya untuk menaikkan *tax ratio* sampai 15% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% maka target kenaikan pajak di Bali tahun 2020 dapat ditingkatkan sekitar 20% dari tahun 2019. Sedangkan anggaran Belanja tercatat sebesar Rp21.446,26 miliar, turun sebesar 2,94% yang didominasi oleh penurunan pagu Belanja Barang sebesar Rp1483,57 miliar atau 37,41% dan penurunan Modal sebesar Rp67,28 miliar atau 2,88% dari pagu Tahun 2019.

Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bali
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)

URAIAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. Pendapatan Negara	12.425,06	2.493,45	13.630,84	2.966,74	16.599,71	2.749,13
I. Penerimaan Dalam Negeri	12.425,06	2.493,45	13.630,84	2.966,74	16.538,04	2.748,82
1. Penerimaan Pajak	11.256,36	2.018,05	12.474,67	2.633,02	14.822,40	2.518,17
2. PNBP	1.168,70	475,40	1.156,17	333,72	1.715,64	230,65
II. Hibah	0	0	0	0	61,67	0,31
B. Belanja Negara	21.843,71	4.509,65	22.096,86	5.184,07	21.446,26	4.628,65
I. Belanja Pemerintah Pusat	10.452,34	1.420,97	10.251,71	1.761,17	9.204,42	1.820,62
1. Belanja Pegawai	4.209,57	798,70	3.941,27	853,55	4.443,73	870,05
2. Belanja Barang	4.384,18	535,88	3.964,70	579,35	2.481,13	540,06
3. Belanja Modal	1.846,80	84,74	2.329,82	327,37	2.262,54	404,52
4. Belanja Bantuan Sosial	11,79	1,65	15,92	0,90	17,02	5,99
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-
II. Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa	11.391,37	3.088,68	11.845,15	3.422,90	12.241,84	2.808,03
1. Transfer Ke Daerah	10.861,16	2.857,01	11.214,96	3.259,89	11.584,05	2.494,27
a. Dana Perimbangan	10.415,66	2.739,76	10.771,38	3.038,10	10.985,98	2.494,27
1) Dana Alokasi Umum	7.092,13	2.348,19	7.400,03	2.464,19	7.492,44	2.405,43
2) Dana Bagi Hasil	590,07	111,90	519,36	97,07	423,58	12,28
3) DAK Fisik	629,11	-	679,83	-	882,29	3,67
4) DAK Non Fisik	2.104,35	279,67	2.172,16	476,84	2.187,67	72,89
b. Dana Insentif Daerah	445,50	117,25	443,58	221,79	598,07	-
c. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-	-	-
2. Dana Desa	530,21	231,67	630,19	163,01	657,79	313,76
C Surplus/Defisit	(9.418,65)	(2.016,20)	(8.466,02)	(2.217,33)	(4.846,55)	(1.879,52)

Sumber: SPAN; Simtrada DJPK; Kanwil DJP Bali; Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT (data diolah)

1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan per 31 Maret 2020 sebesar Rp.2.518.17 (OM SPAN) atau Rp2.467,66 miliar (Kanwil DJP Bali) didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1.770,71 miliar diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp667,98 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020 yakni sebesar Rp369,33 miliar. Dalam tiga bulan pertama di tahun 2020, penerimaan perpajakan tertinggi disumbangkan oleh Kota Denpasar yang tercatat mencapai Rp1.044,02 miliar

.

Grafik 2.1
Realisasi Penerimaan Perpajakan Triwulan 1 2020
(miliar rupiah)

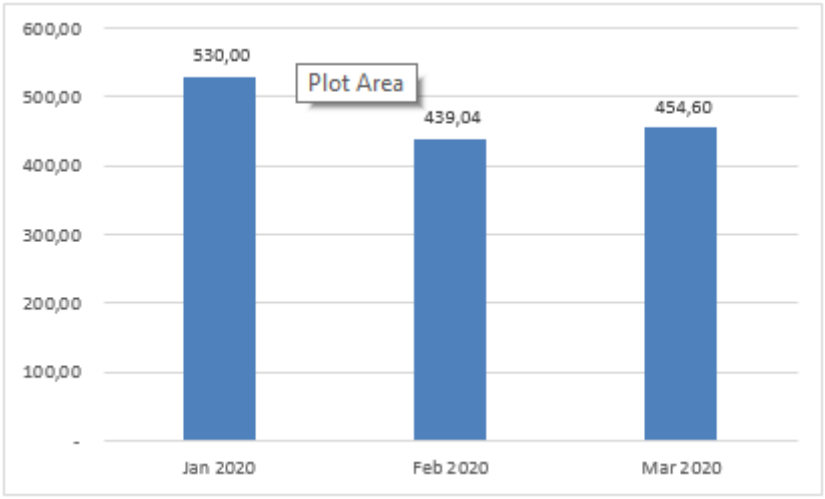

Sumber: SPAN; Simtrada DJPK; Kanwil DJP Bali; Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT (data diolah)

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan 31 Maret 2020 di wilayah Provinsi Bali sebesar Rp1.770,71 miliar, meningkat sebesar Rp43,94 miliar atau sekitar 2,48% dari periode yang sama di tahun 2019, disebabkan oleh pajak yang berasal dari karyawan hotel dan restoran di daerah wisata (Denpasar, Badung dan Gianyar) dan tingkat kepatuhan WP PPh Badan yang semakin baik mencapai 95% terutama pada batas waktu SPT Tahunan pada bulan Maret 2020. Daerah yang tercatat dengan realisasi PPh tertinggi adalah Kota Denpasar diikuti oleh Kabupaten Badung.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp667,98 miliar, menurun sebesar Rp11,27 miliar, sekitar 1,65% dari periode

yang sama pada tahun 2019. Penurunan ini salah satunya disebabkan meluasnya Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Daerah dengan realisasi PPN tertinggi tercatat pada Kota Denpasar yakni sebesar Rp288,33 miliar atau sekitar 43,16% dari total penerimaan PPN di Bali

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM sampai dengan 31 Maret 2020 di wilayah Provinsi Bali mengalami tren pertumbuhan yang fluktuatif. Realisasi PPnBM tercatat sebesar Rp921,02 juta atau telah mencapai 5,43% dari target yang ditetapkan. Kabupaten Badung tercatat sebagai daerah dengan realisasi PPnBM tertinggi yakni sebesar Rp697,17 juta atau sekitar 75,70% dari total penerimaan PPnBM di Bali untuk penerimaan PPnBM Triwulan I tahun 2020.

d) Penerimaan Pabean dan Cukai

Penerimaan Pabean dan Cukai sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp230,70 miliar, atau sekitar 21,40% dari target yang ditetapkan. Penerimaan terdiri dari realisasi Pabean sebesar Rp43,60 miliar dan Cukai sebesar Rp187,10 miliar. Sampai dengan triwulan I 2020, penerimaan cukai cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan konsumen atas minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Grafik 2.2
Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Triwulan 1 2020
(miliar rupiah)

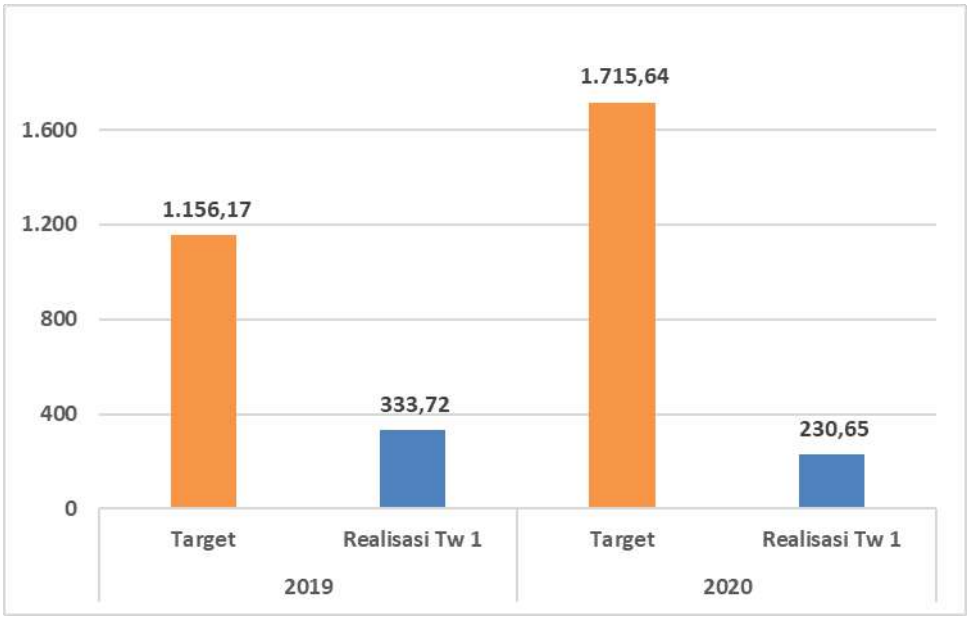

Sumber: Aplikasi Om SPAN

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2020 lebih dari target PNBP TA 2019. Pada TA 2020 target PNBP yaitu senilai Rp.1,15 triliun rupiah, sedangkan Pada TA 2019 targetnya adalah Rp. 1,71 triliun. Namun demikian realisasi PNBP Triwulan I TA 2020 kurang dari realisasi PNBP TA 2019. Realisasi tahun berjalan yaitu sebesar Rp.230,65 triliun.

3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan 31 Maret 2020 tidak terdapat realisasi Pendapatan Hibah di wilayah Provinsi Bali.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Total realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp1.820,62 miliar, atau 19,78% dari pagu tahun 2020 sebesar Rp9.204,42 miliar. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja dengan persentase realisasi tertinggi yakni 35,19% atau Rp5,99 miliar, sedangkan terendah adalah pada Belanja Modal yakni 17,88% atau Rp404,52 miliar. Di sisi lain, realisasi Belanja Pegawai tercatat sebesar 870,05 miliar atau 19,58% dari pagu.

Grafik 2.3
Belanja Pemerintah Pusat
(miliar rupiah)

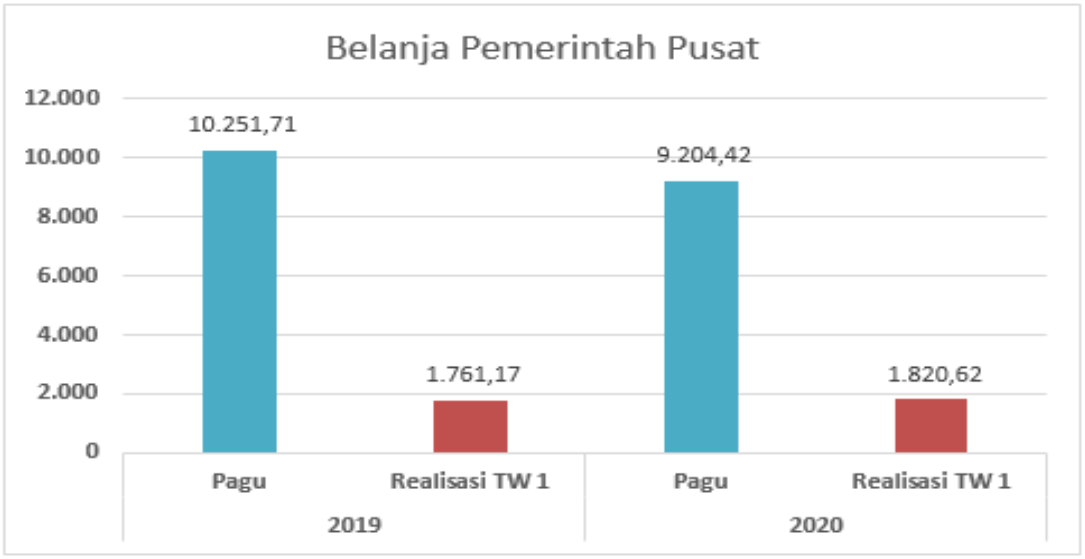

Sumber: Aplikasi Om SPAN

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Capaian realisasi dana transfer dan dana desa tercatat sebesar Rp2.808,01 miliar atau 22,93% dari total pagu. Realisasi Dana Desa mencapai 48,45% atau Rp318,71 miliar sedangkan DAK Fisik baru terealisasi 3,67 miliar atau 0,41% dari pagu

total. Terhambatnya penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa tidak terlepas dengan adanya force major berupa pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) yang berakibat dihentikannya proses pengadaan DAK Fisik terhitung tanggal 27 Maret 2020 dan perubahan alokasi sebagian Dana Desa untuk Banuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional/sistem keuangan nasional.

Grafik 2.3
Belanja Transfer dan Dana Desa
(miliar rupiah)

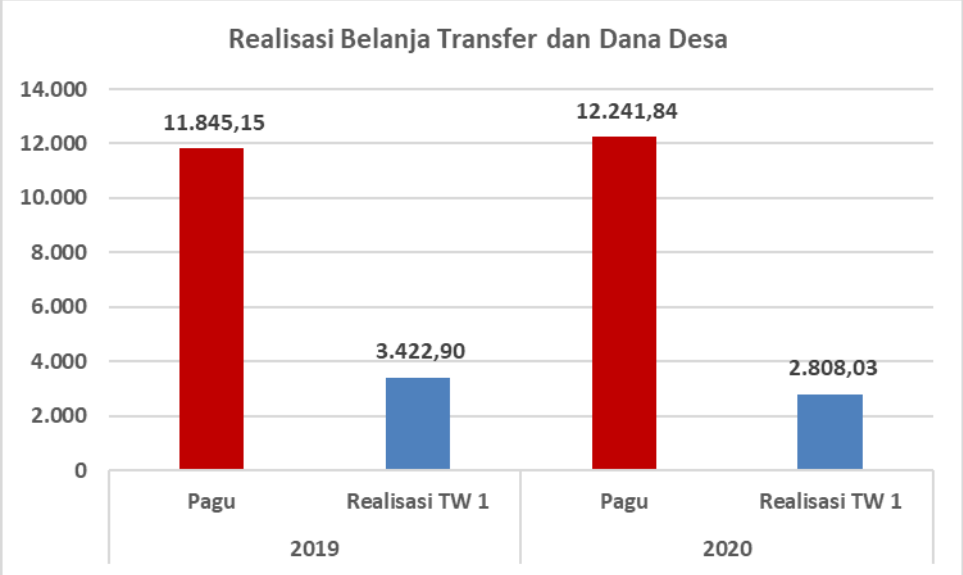

Sumber: Aplikasi Om SPAN

C. Prognosis Realisasi APBN

Untuk menentukan prognosis realisasi APBN di Provinsi Bali, yang menjadi pertimbangan adalah apabila kondisi tidak terjadi wabah *Covid-19* dan adanya penghematan oleh pemerintah tentunya akan sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan menggunakan analisis permodelan sebagaimana tren penerimaan tahun 2019 dan data triwulan I 2020 maka diperkirakan capaian realisasi pendapatan negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 sekitar 88,29% atau sekitar Rp14.657,26 milyar (dengan catatan kondisi perekonomian tidak terganggu pandemi Corona Virus Disease 19). Untuk belanja negara dengan kebijakan efisiensi belanja, peningkatan belanja produktif, tren realisasi belanja dari periode sebelumnya, realisasi belanja sampai dengan 31 Maret 2020, serta penghematan pada belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperkirakan realisasi belanja negara sampai akhir tahun 2020 mencapai 85,64% dari pagu awal DIPA tahun 2020.

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

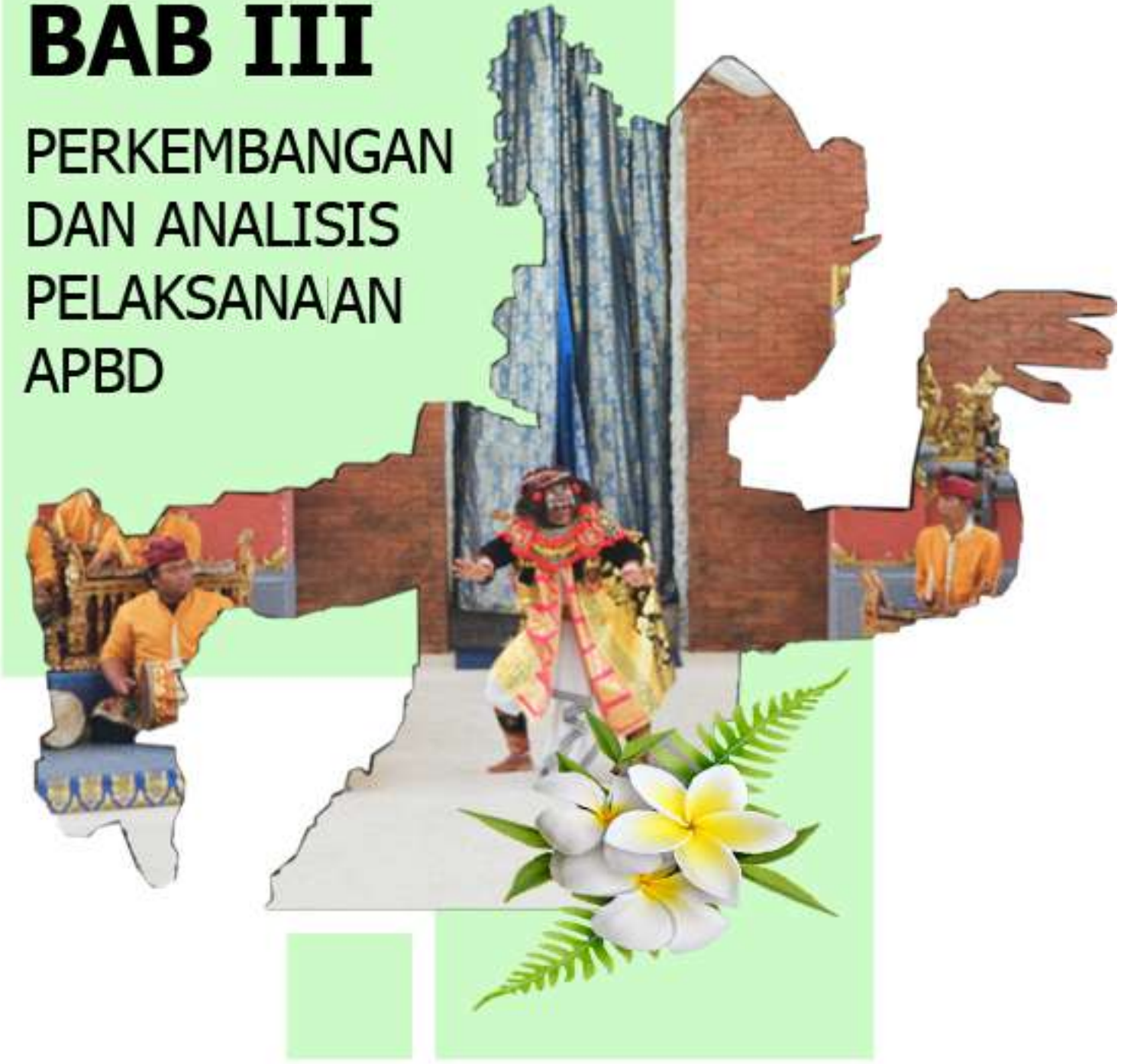

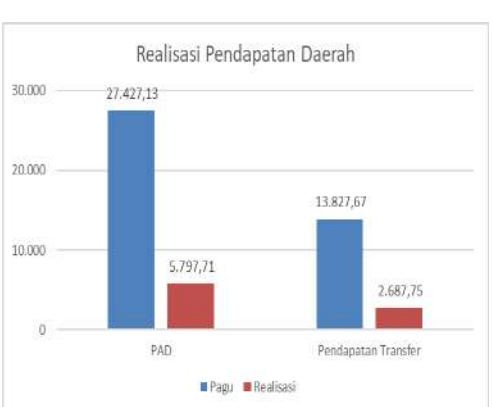

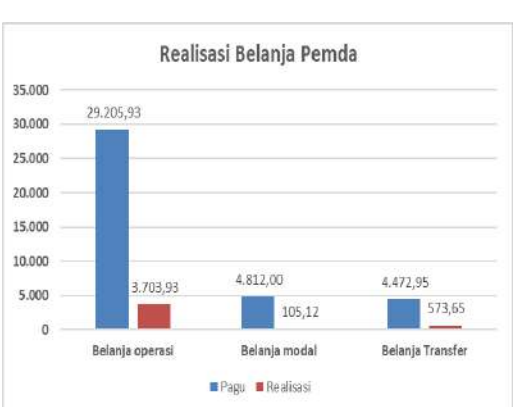

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dana APBD digunakan untuk pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan efektivitas serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 3.1
Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bali
s.d. Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2019	
	Pagu	Real	Pagu	Real
PENDAPATAN	**28.060,28**	**4.321,28**	27.427,13	5.797,71
PAD	13.797,66	1.529,30	12.905,69	3.063,96
Pajak Daerah	11.240,69	1.246,21	10.246,81	2.099,33
Retribusi Daerah	528,00	73,42	558,25	96,68
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	440,51	0,04	464,16	505,58
Lain-Lain PAD yang Sah	1.588,46	209,63	1.636,46	362,38
Pendapatan Transfer	**13.754,12**	**2.775,15**	**13.827,67**	**2.687,75**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	10.760,13	2.466,46	10.994,88	2.483,36
Dana Bagi Hasil Pajak	518,01	54,81	428,21	11,35
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0	0	4,90	0,70
Dana Alokasi Umum	7.400,13	2.186,87	7492,44	2.405,44
Dana Alokasi Khusus	2.841,99	224,78	3.069,33	65,87
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**1.073,76**	**292,49**	**977,01**	**163,23**
Dana Otonomi Khusus	-	-	0	0
Dana Penyesuaian	1.073,76	292,49	977,01	163,23
Transfer Pemerintah Provinsi	**1.182,40**	**-**	1.300,97	21,63
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.182,40	-	1.246,91	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	54,07	21,63
Transfer Bantuan Keuangan	**737,83**	**16,20**	**554,80**	**19,53**
Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	737,83	16,20	554,80	19,53
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	**508,50**	**17,06**	**693,77**	**46,00**
Pendapatan Hibah	508,50	16,95	468,98	-
Pendapatan Lainnya	-	0,11	224,79	46,00
JUMLAH PENDAPATAN	**28.060,28**	**4.321,28**	**27.427,13**	**5.797,71**
BELANJA	**24.932,78**	**2.428,07**	24.732,98	3.130,29
Belanja Pegawai	9.558,14	1.309,32	9.499,66	1.571,78
Belanja Barang	7.846,02	736,22	8.124,47	1.258,72
Belanja Bunga	23,08	2,01	8,60	1,49
Belanja Subsidi	21,44	-	11,44	-
Belanja Hibah	2.256,10	156,81	1.775,96	158,13
Belanja Bantuan Sosial	300,26	6,98	379,31	26,45
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0
Belanja Modal	4.880,95	216,68	4.812,00	105,12
Belanja Tidak Terduga	46,79	0,05	121,55	8,59
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	5.068,44	389,89	4.472,95	573,65
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	2.205,47	55,36	2.185,12	136,95
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.205,47	55,36	845,08	135,14
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	1.340,04	1,81
Transfer Bantuan Keuangan	2.862,97	334,53	2.287,83	436,69
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	2.862,97	334,53	984,86	63,58
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	0	1.293,41	373,05
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	9,56	0,06
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	30.001,22	2.817,96	29.205,93	3.703,93
SURPLUS/DEFISIT	(1.941,94)	1.504,55	(1.778,80)	2.093,78

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Pemda Lingkup Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp3,06 triliun, bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terealisasi sebesar 24% dari total pagu perkiraan PAD.

a) Pendapatan Pajak Daerah

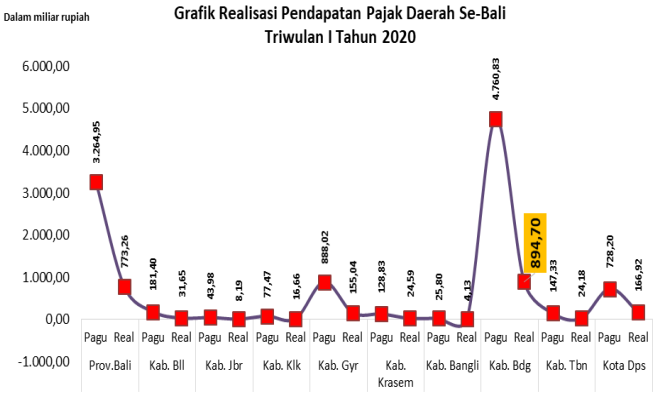

Sumber data LRA masing-masing Pemda se-Bali di olah

Pajak Daerah Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Bali digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sesuai amanat Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pendapatan Pajak Pemda Lingkup Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2020. Pendapatan pajak daerah tertinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 diperoleh Pemda Kabupaten Badung mencapai Rp894,70 miliar, lebih dari setengahnya bersumber dari Pajak Hotel yaitu sebesar Rp567,21 miliar.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah Lingkup Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp96,68 miliar. Penerimaan retribusi daerah tertinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 diperoleh Pemda Kabupaten Badung mencapai Rp30,60 miliar sumber terbesar dari sektor retribusi jasa usaha yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp18.112 miliar.

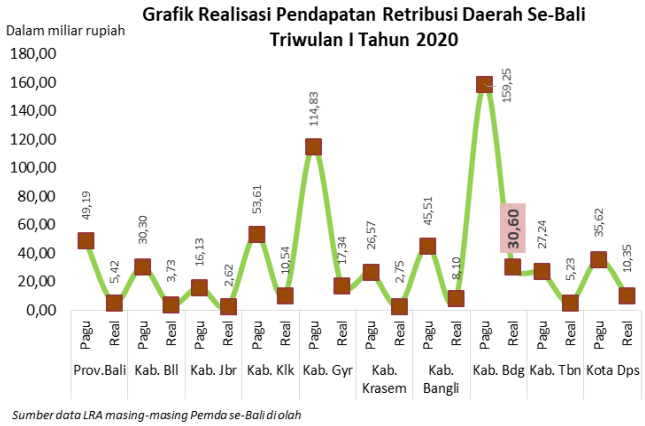

Sumber data LRA masing-masing Pemda se-Bali di olah

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

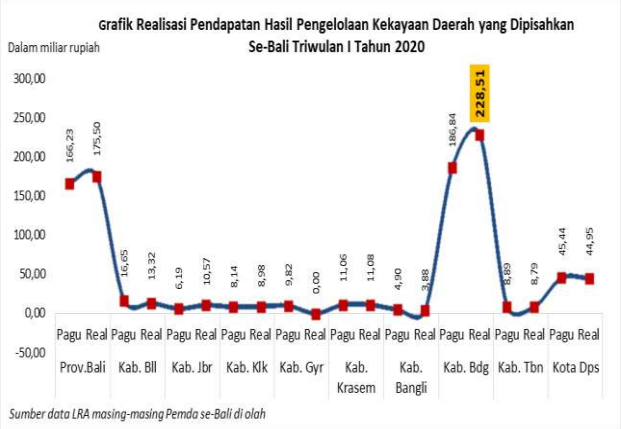

Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Pemda Lingkup Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp505,58 miliar. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019. Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi yakni Kabupaten Badung sebesar Rp228,51 miliar dan Kabupaten Badung memiliki kontribusi lebih dari setengah pendapatannya dari sektor ini. Kabupaten yang seluruhnya bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah BUMD.

d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

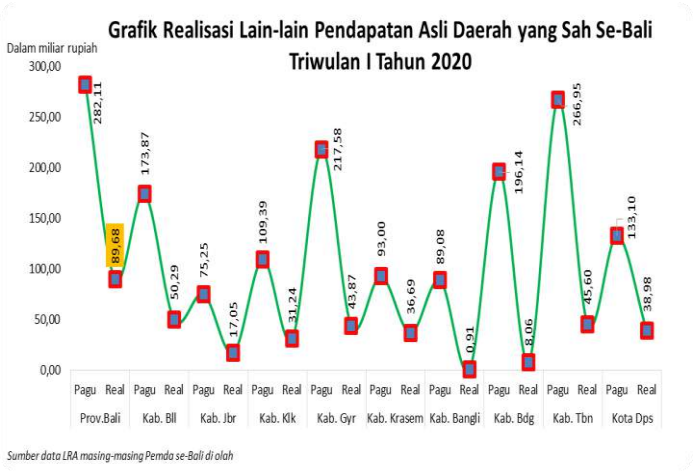

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemda Lingkup Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp362,38 miliar. Penerimaan daerah tertinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 di sektor ini diperoleh Pemda Provinsi Bali mencapai Rp89,68 miliar bersumber dari Pendapatan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah yang tersesar adalah Pendapatan Denda Pajak kendaraann bermotor sebesar Rp18,84 miliar dan Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sebesar Rp394,94 juta.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Pemda Lingkup Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 mencapai Rp2.483,35 miliar, bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus. Secara keseluruhan Dana Perimbangan tertinggi ada di Pemda Provinsi Bali mencapai Rp444,50 miliar yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tertinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 diperoleh Pemda Kabupaten Karangasem mencapai Rp2,97 miliar yang sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 mencapai Rp2,50 miliar.

Grafik Realisasi Dana Perimbangan Se-Bali Triwulan I Tahun 2020

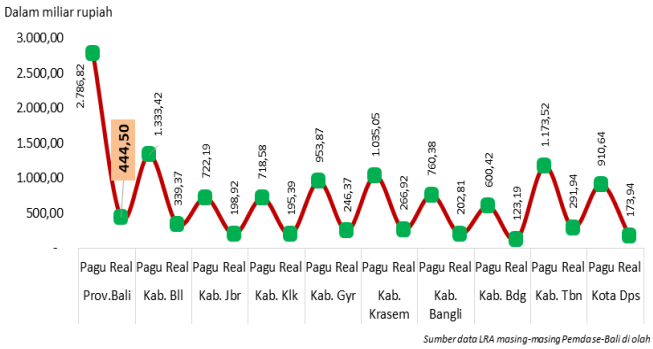

Sumber data LRA masing-masing Pemda se-Bali di olah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan dari Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Se-Provinsi Bali mencapai Rp46 miliar. Lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp279,74 miliar atas 85,88%. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 diperoleh Pemda Kabupaten Jembrana mencapai Rp31,24 miliar.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Hibah dan Belanja Modal Triwulan I Tahun 2020

Sumber data LRA masing-masing Pemda se-Bali di olah

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 Belanja Pegawai merupakan belanja dengan nominal realisasi paling tinggi, yaitu sebesar Rp1.572 miliar atau sekitar 16,55% dari pagu anggarannya.

Sedangkan Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp1,259 miliar memiliki atau sebesar 15,49% dari pagu anggarannya, Sedangkan Hibah realisasinya sebesar Rp158 miliar atau 8,90% dari pagu anggaran dan Belanja Modal realisasi sebesar Rp105 miliar atau 2,18% dari pagu anggarannya. Dari total

realisasi Belanja Pegawai merupakan belanja dengan kontribusi terbesar dari seluruh realisasi atau sebesar 50,80% dari total realisasi dan yang terendah yakni Belanja Modal dengan kontribusi sebesar 3,40% dari total realisasi belanja. Ini menandakan bahwa di Provinsi Bali pada periode Triwulan I Tahun 2020, belanja yang bersifat konsumtif realisasinya masih lebih tinggi dibandingkan belanja produktif.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Secara keseluruhan pemerintah daerah lingkup Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sebesar 21,07% dari belanja daerahnya, anggaran ini telah sesuai dengan amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 48/2008 tentang Pendanaan Fungsi Pendidikan yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran. Sedangkan untuk bidang kesehatan telah dialokasikan anggaran sebesar 14,89%, anggaran ini juga telah sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU No 36/2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari total anggaran di luar gaji.

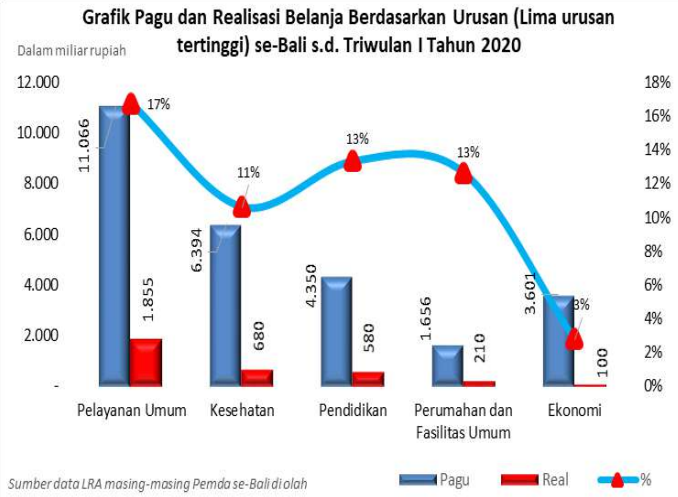

Realisasi belanja daerah berdasarkan klasifikasi urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 dengan nominal tertinggi adalah belanja urusan Keuangan (masuk dalam detail Fungsi Pelayanan Umum) yakni sebesar 18,82% dari pagu anggarannya atau sebesar Rp896,61 miliar, sedangkan realisasi belanja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian merupakan belanja dengan persentase realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan pagu anggarannya yakni sebesar 96,09% atau sebesar Rp449,40 miliar dari pagu anggaran.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Pada APBD 2020, anggaran pendapatan daerah sebesar Rp27.427,13 miliar bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami penurunan sebesar Rp643,05 miliar (2,29%) dibandingkan dengan pendapatan daerah Triwulan I tahun 2019 sebesar

Rp28.070,18 miliar. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp5.797,71, mengalami kenaikan sebesar Rp1.476,20 miliar atau sebesar (34,16%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah periode yang sama di Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.321,51 miliar. Kenaikan pendapatan daerah terutama didorong oleh kenaikan realisasi pendapatan dari semua komponen PAD terutama komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kita ketahui bahwa masuknya pandemic corona virus (Covid-19) di Bali mulai terasa pada pertengahan bulan Maret 2020 disaat itu masih normal kondisi perekonomian Bali secara keseluruhan.

Anggaran belanja daerah Tahun 2020 sebesar Rp24.732,98 miliar mengalami sedikit penurunan (Rp199,08) juta atau (0,81%) dari periode yang sama tahun 2019 yakni sebesar Rp24.932,78 miliar. Meskipun realisasi belanja Triwulan I 2020 masih sekitar 12,66%, mengingat bahwa Tahun anggaran 2020 merupakan tahun awal terakhir implementasi RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023, anggaran yang disusun telah berorientasi pada program baru dan gubernur baru dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

Gambar: Patung Garuda Wisnu

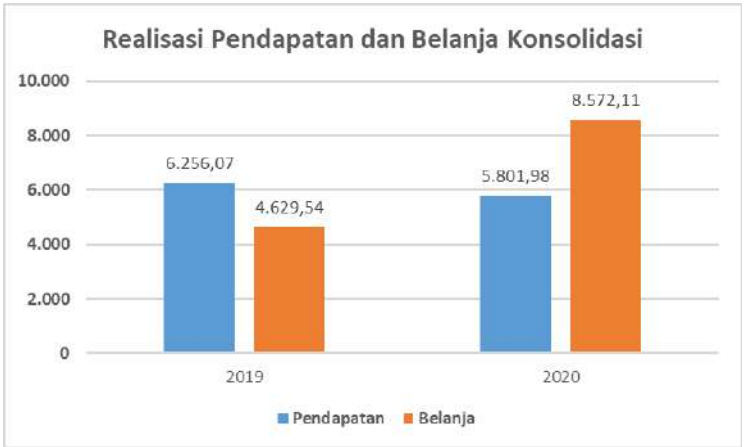

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Bali s.d. Triwulan I Tahun 2020 (*dalam miliar rupiah*)

Uraian	2020				2019
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan / Penurunan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	3.079,82	2.722,16	5.801,98	-7,26%	6.256,07
Pendapatan Perpajakan	2.547,59	2.099,33	4.646,91	-17,11%	5.605,99
Pendapatan Bukan Pajak	532,24	964,64	1.496,87	142,68%	616,82
Hibah	-	-	-	-100,00%	17,06
Transfer	-	2.714,72	(341,81)	-2.211,23%	16,19
Belanja Negara	4.887,21	3.684,91	8.572,11	85,16%	4.629,54
Belanja Pemerintah	1.830,68	3.130,29	4.960,97	17,01%	4.239,65
Transfer	3.056,53	554,62	554,62	42,25%	389,89
Surplus/(Defisit)	(1.807,39)	2.093,78	286,39	-82,39%	1.626,53
Pembiayaan	-	1.483,63	1.483,63	68,53%	880,32
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	1.499,61	1.499,61	67,08%	897,53
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	15,98	15,98	-7,18%	17,21
SILPA/(SIKPA)	(1.807,39)	3.577,41	1.770,02	-29,39%	2.506,85

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan I 2020 (diolah)
* *Catatan :*
Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp3.056,53 miliar dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

Pendapatan Konsolidasian mengalami penurunan sebesar Rp(454,09) miliar atau sekitar (7,26%) dari periode yang sama sebelumnya. Selanjutnya selisih kenaikan pada PNBP sebesar Rp880,05 miliar atau 142,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Untuk Belanja Konsolidasian mengalami kenaikan sebesar Rp3.942,57 miliar atau 85,16% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Hal ini didorong oleh peningkatan belanja pemerintah yang naik sebesar 17,01% dari periode sebelumnya.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan konsolidasian sampai dengan Triwulan I tahun 2020 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan sebesar Rp4.646,91 miliar dan PNBP sebesar Rp1.496,87 miliar. Pendapatan perpajakan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp(959,08) kemungkinan disebabkan adanya pengaruh dari pandemik Covid-19 walaupun baru dirasakan pada pertengahan bulan Maret 2020 namun dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Bali yang didominasi bidang pariwisata yang kecendrungan terus menurun. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 mengalami

kenaikan sebesar Rp880,05 atau 142,68%. Kenaikan PNBP yang paling dominan pada Pendapatan BLUD dan Pendapatan Denda Pajak.

Sumber data LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2020 (Data diolah)

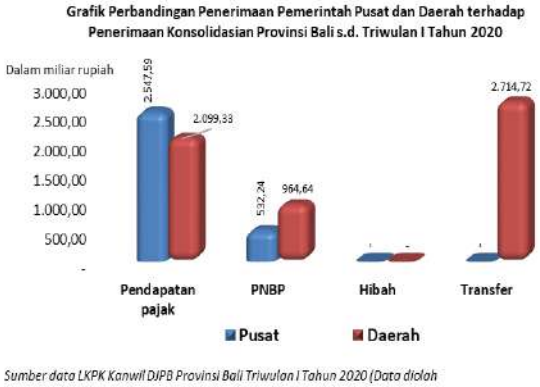

Sumber data LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2020 (Data diolah

Pendapatan Konsolidasian Provinsi Bali sampai dengan triwulan I tahun 2020 didominasi oleh pendapatan Pemerintah Pusat, dimana pendapatan Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp3,08 triliun memberi kontribusi sebesar 53,08% sedangkan pendapatan Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp2,72 triliun memberi kontribusi sebesar 46,92%. Pada Grafik Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah tercatat bahwa pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak yang merupakan kontributor tertinggi pada pendapatan pendapatan konsolidasian didominasi oleh Pemerintah Pusat.

2. Analisis Perubahan

Pendapatan Konsolidasian sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.801,98 miliar, menurun sebesar Rp 454,09 miliar atau 7,26 dibanding periode Triwulan I Tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemik Covid-19 yang mulai sangat terasa pada pertengahan bulan Maret 2020, menurunnya Pendapatan Perpajakan secara nominal tercatat mengalami penurunan yakni sebesar Rp959,08 miliar atau sebesar 17,11% jika dibandingan periode yang sama tahun 2020 sementara PNBP mengalami peningkatan sebesar Rp880,05 atau sebesar 142,68% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Sumber data LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2020 (Data diolah)

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap naik-turunnya realisasi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi di Bali triwulan I 2020, BPS Provinsi Bali bahwa jika dibandingkan triwulan I tahun 2019 (y-on-y), ekonomi Bali triwulan I tahun 2020 tercatat tumbuh negatif 1,14 persen dan penyebabnya merebaknya covid-19 dengan pembatasan pergerakan masyarakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan pendapatan konsolidasian naik 1,29% dibandingkan dari triwulan I tahun 2019.

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidaian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2019 dan 2020

Uraian	Triwulan I 2019 (Rupiah)	Triwulan I 2020 (Rupiah)	naik / turun
Penerimaan Perpajakan	5.605,99	4.646,91	-7,26%
PNBP	616,82	1.496,87	142,68%
Total	6.222,81	6.143,78	1,29%
PDRB/Pert. Ekonomi	60.120.97	60.602,08	0,80%

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2020, BPS (data diolah)

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

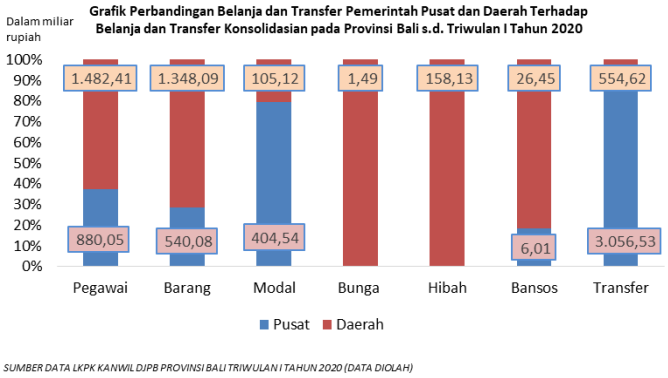

SUMBER DATA LKPK KANWIL DJPB PROVINSI BALI TRIWULAN I TAHUN 2020 (DATA DIOLAH)

Porsi terbesar Belanja Konsolidasian tercatat pada Belanja Pegawai sebesar 2.362,46 miliar, diikuti oleh Belanja Barang sebesar Rp1.888,17 miliar. Hal ini mengindikasikan belanja operasional masih mendominasi di wilayah Provinsi Bali. Untuk dapat menekan belanja pegawai, pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi jumlah pegawai dengan melakukan analisis beban kerja.

2. Analisis Perubahan

Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian triwulan I Tahun 2020 secara agregat mengalami kenaikan sebesar Rp721,32 miliar atau 17,01 dibandingkan dengan tahun 2019. Dilihat dari nominal dan persentase kenaikannya, belanja pemerintah dan belanja transfer tercatat mengalami kenaikan dan yang paling tinggi kenaikannya yakni belanja transfer sebesar Rp164,73 miliar atau sekitar

42,25%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan untuk pembangunan disegala bidang di Daerah.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Tabel Rasio Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Bali s.d Triwulan I Tahun 2019 dan 2020

Uraian	Triwulan I 2019	Triwulan I 2020
Belanja	Rp4.239,65M	Rp4.960,97M
Transfer	Rp16,19M	Rp2.714,72M
Belanja dan Transfer	Rp4.629,54M	Rp5.515,58M
PDRB/Pert. Ekonomi	Rp60.120.97M	Rp60.602,08M
Rasio Belanja & Transfer thd PDRB	7,700%	9,101%

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2020, BPS(diolah)

Rasio belanja dan transfer pemerintah terhadap PDRB Provinsi Bali sampai dengan triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar 9,101%, mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto

Sampai dengan akhir triwulan I 2020, Provinsi Bali tercatat mengalami surplus LO sebesar Rp4.356.07 miliar. Hal ini menandakan bahwa pendapatan yang diterima di Bali mampu membiayai seluruh belanja/beban yang ada. Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Bali s.d. triwulan I tahun 2020:

Kegiatan Operasional	
Pendapatan Operasional	**8.858.504.755.181**
Perpajakan	4.646.913.071.767
PNBP	1.497.371.697.388
Transfer	2.714.219.986.026
Lain-lain Pendapatan yang Sah	-
Beban Operasional	**4.550.829.625.970**
Beban Pegawai	2.437.923.023.707
Beban Persediaan	-
Beban Barang dan Jasa	850.732.993.104
Beban Pemeliharaan	356.352.578.247
Beban Perjalanan Dinas	145.795.548.971
Beban Barang dan Jasa BLU	-
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	13.326.333.674
Beban Subsidi	-
Beban Hibah	158.133.240.850
Beban Bantuan Sosial	32.460.173.086
Beban Lain-lain	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-
Beban Kerugian dan Lainnya	-
Beban Transfer	554.618.304.782

Beban Bunga	1.487.429.549
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	**4.307.675.129.211**
Kegiatan Non Operasional	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.520.961.464
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	**1.520.961.464**
Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	46.879.774.539
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**46.879.774.539**
Pos Luar Biasa	
Pendapatan Luar Biasa	-
Beban Luar Biasa	-
Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	**-**
Surplus/(Defisit) LO	**4.356.075.865.214**

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2020 (diolah)

1. Kontribusi Belanja Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB

Uraian	TW I 2019	TW II 2020
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Rp 4.877,56 miliar	Rp 4.868,56 miliar
PDRB	Rp60.120.97M	Rp60.602,08M
Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB	8,11%	8,03%

Sumber : BPS Prov. Bali (diolah)

Kontribusi belanja konsumsi pemerintah dalam PDRB triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar 8,03% (menurun 07 basis poin dari triwulan I 2019), menunjukkan bahwa belanja konsumsi pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Bali meskipun dengan porsi yang tidak terlalu besar.

2. Kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB

Uraian	TW I 2019	TW I 2020
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp18.234,68 miliar	Rp18.086,54 miliar
PDRB	Rp60.120.97M	Rp60.602,08M
Kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB	30,33%	29,84%

Sumber : BPS Prov. Bali (diolah)

Kontribusi investasi pemerintah dalam PDRB triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar 29,84% (menurun 1,51 basis poin dari triwulan I 2019), menunjukkan bahwa investasi pemerintah, khususnya belanja modal dari proyek infrastruktur masih kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Kontribusi investasi pemerintah masih rendah dari kontribusi belanja (pengeluaran konsumsi) pemerintah terhadap PDRB menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Bali masih tumbuh negatif.

BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Gambar: Tari Barong

Grafik 5.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Bali Periode Desember 2019 s.d. Maret 2020

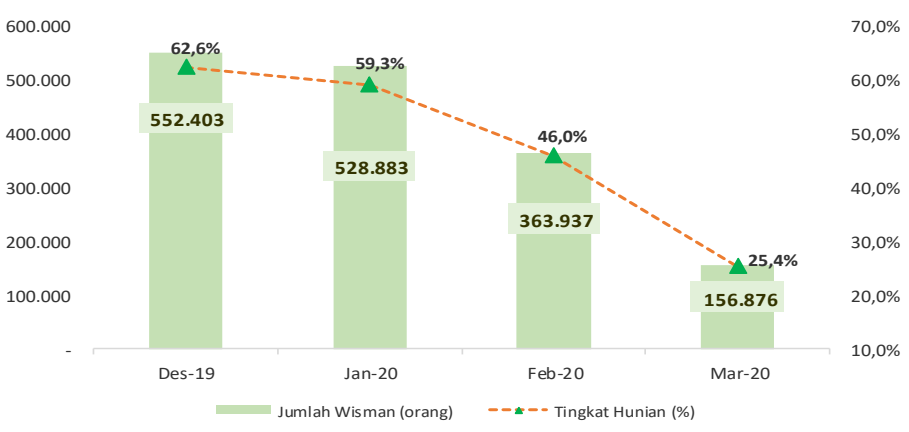

BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. PARIWISATA BALI LESU AKIBAT COVID-19, PENDAPATAN PELAKU WISATA TURUN

Sumber: *https://www.aa.com.tr/id/nasional/pariwisata-bali-lesu-akibat-covid-19-pendapatan-pelaku-wisata-turun/1762245, 11 Maret 2020*

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tahunan 2019 (2020), Provinsi Bali mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02%. Selain itu, dari indikator kesejahteraan, Provinsi Bali juga memiliki kondisi yang lebih baik daripada rata-rata nasional. Indikator Pengembangan Manusia (IPM) sebesar 75,38, sedangkan IPM nasional sebesar 71,92. Selanjutnya, dari indikator tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, keduanya berada berada di bawah angka nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali sebesar 1,52% lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 5,28%, sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 3,79% di Bali juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,22%.

Adanya pandemi Covid-19 yang mulai menyerang pertengahan Maret 2020 sangat berdampak pada aktivitas masyarakat Bali, termasuk calon wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan berbagai kebijakan dalam penanganan Covid-19, diantaranya adalah *social/physical distancing*, pengawasan pada jalur transportasi dari/ke luar Bali (penerbangan/penyeberangan), serta menutup seluruh tempat wisata per tanggal 20 Maret 2020. Hal ini tentu sangat mempengaruhi lalu lintas orang dan barang, terutama dari luar Bali ke Bali. Dengan adanya kebijakan tersebut, penurunan jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional merupakan efek samping yang tidak dapat dielakkan lagi. Dan tentunya, mengganggu pergerakan ekonomi masyarakat yang memang bergantung pada sektor pariwisata. Salah satu indikatornya adalah penurunan jumlah wisatawan, terutama wisatawan mancanegara (wisman) dan tingkat hunian hotel berbintang di Bali yang

mengalami penurunan cukup drastis, sebagaimana digambarkan dalam Grafik 5.1 berikut ini:

Grafik 5.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Bali
Periode Desember 2019 s.d. Maret 2020

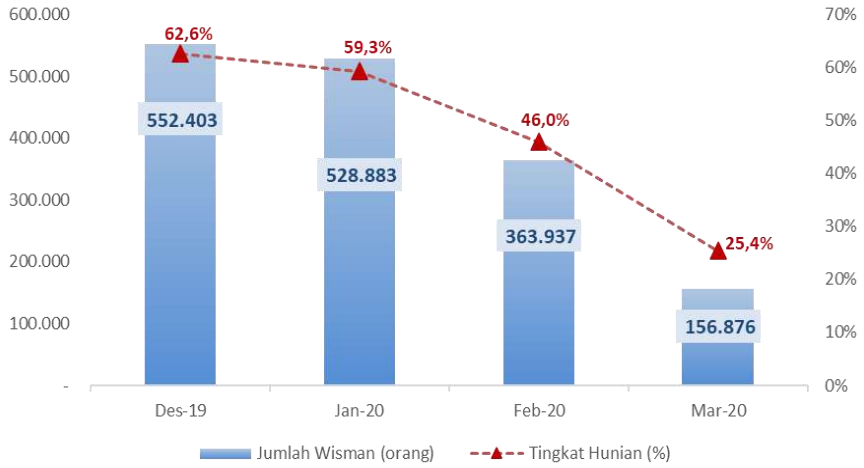

Sumber: BPS Provinsi Bali (2020), diolah.

Jumlah kunjungan wisman ke Bali sebanyak 156.876 orang pada bulan Maret 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar -56,9% dibandingkan jumlah kunjungan pada bulan Februari 2020 (mtm), atau sebesar -65,11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy). Bahkan, jumlah tersebut merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir (BPS Provinsi Bali, 2020). Dengan adanya penurunan jumlah wisatawan tersebut, maka sktor-sektor usaha yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata akan terdampak dan pendapatan masyarakat/UMKM akan mengalami penurunan. Apabila tidak segera selesai pandemi Covid-19 ini, maka dikhawatirkan akan menjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih buruk (negatif).

B. TRIWULAN I 2020, EKONOMI BALI TUMBUH NEGATIF

Sumber: *www.balipost.com/news/2020/05/06/120179/Triwulan-I-2020,Ekonomi-Bali...html, 6 Mei 2020*

Sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian Bali. Meskipun jumlah pasien positif Covid-19 maupun PDP/ODP di Bali tidak sebanyak yang terjadi di beberapa Provinsi di Jawa, akan tetapi dampak terhadap perekonomian Bali sangat terasa. Hal ini dikarenakan Bali sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai penopang perekonomian. Selain itu, sektor-sektor ekonomi lainnya juga

memiliki keterkaitan yang sangat kuat (berafiliasi) dengan pariwisata, misalnya perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi, makanan dan minuman (akmamin), industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, jasa, dan sebagainya.

Sebagai provinsi yang dikenal dengan pariwisatanya, maka Bali harus memiliki akses keluar-masuk yang mudah. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, akses masuk dan keluar Bali telah dibatasi dan diawasi dengan ketat, bahkan tempat-tempat wisata telah ditutup sejak tanggal 20 Maret 2020. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan lalu lintas transportasi darat, laut, dan udara, serta lalu lintas penumpang dan barang. Berdasarkan publikasi BPS Provinsi Bali (2020), penurunan yang terjadi cukup signifikan, baik pada penerbangan domestik, penerbangan internasional, dan yang melalui pelabuhan laut. Tabel 5.1 berikut ini menunjukkan pergerakan (kenaikan/penurunan) lalu lintas transportasi dan pergerakan manusia/barang hingga akhir periode Triwulan I Tahun 2020.

Tabel 5.1. Kenaikan/Penurunan Lalu Lintas Transportasi Udara dan Laut, Penumpang, dan Barang Januari s.d. Maret 2020 (dalam %)

URAIAN	Kenaikan/Penurunan	
	Mar19 - Mar20 (YoY)	Feb20-Mar20 (MtM)
Penerbangan Domestik	-11,44%	-9,62%
Jumlah Penumpang Domestik	-31,49%	-26,97%
Bagasi dan Barang Domestik	-34,78%	-8,97%
Penerbangan Internasional	-38,75%	-32,35%
Jumlah Penumpang Internasional	-46,41%	-35,27%
Bagasi dan Barang Internasional	-32,70%	-14,25%
Pelabuhan Laut	-37,24%	-57,08%
Jumlah Penumpang	-61,91%	-38,24%
Jumlah Barang	152,08%	71,93%

Sumber: BPS Provinsi Bali (2020), diolah.

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam tabel 5.1 tersebut di atas, telah terjadi penurunan jumlah lalu lintas penerbangan baik internasional maupun domestik, serta transportasi laut. Hal ini diikuti dengan penurunan lalu lintas penumpang dan barang. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa lalu lintas barang melalui pelabuhan laut justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada bulan Maret 2020, yaitu hingga sebesar 71,93% jika dibandingkan dengan bulan Februari 2020 (mtm) dan 152,08% dibandingkan dengan Maret 2019 (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masih berjalan meskipun mengalami penurunan.

Selanjutnya, dampak pandemi Covid-19 ini paling besar dirasakan oleh sektor pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi yang terafiliasi langsung dengan pariwisata, seperti perdagangan besar dan eceran, penyediaan akmamin, industri pengolahan, industri jasa, dan lain-lain. Sedangkan sektor yang relatif mampu bertahan diantaranya adalah sektor pertanian/perburuan/kehutanan dan sektor transportasi/pergudangan/ komunikasi. Sektor yang paling terdampak adalah pada penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman (akmamin) yang mengalami penurunan sebesar 15,12%.

Apabila dilihat dari sebaran data debitur penerima KUR/UMi, mayoritas yang menerima pembiayaan KUR/UMi adalah pribadi/UMKM yang berafiliasi dengan sektor pariwisata. Tabel 5.2 berikut ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna KUR/UMi adalah sektor-setor usaha yang berafiliasi dengan pariwisata. Tidak menutup kemungkinan bahwa UMKM pengguna skema pembiayaan lain di luar KUR/UMi juga didominasi oleh UMKM-UMKM yang berafiliasi dengan pariwisata.

Tabel 5.2. Penyaluran KUR-UMi menurut Sektor Ekonomi Periode Januari s.d. Maret 2020 (dalam %)

NO	NAMA_SEKTOR	JML DEBITUR	PENYA-LURAN	% sektor
1	**Perdagangan Besar dan Eceran**	**9.963**	**547.232**	**30,7%**
2	**Pertanian, Perburuan dan Kehutanan**	**10.056**	**346.846**	**19,5%**
3	**Industri Pengolahan**	**7.746**	**341.941**	**19,2%**
4	**Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum**	**2.491**	**272.734**	**15,3%**
5	**Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya**	**3.427**	**183.210**	**10,3%**
6	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	302	30.805	1,7%
7	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	297	27.291	1,5%
8	Perikanan	378	15.625	0,9%
9	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100	8.952	0,5%
10	Jasa Pendidikan	56	4.596	0,3%
11	Konstruksi	23	2.355	0,1%
12	Pertambangan dan Penggalian	-	-	0,0%
13	Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha	-	-	0,0%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	0,0%
TOTAL		**34.839**	**1.781.586**	**100,0%**

Sumber: BPS Provinsi Bali (2020), diolah.

Dari sisi Belanja Pemerintah sebagai salah satu pengungkit untuk mendorong perekonomian, pada dasarnya realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada periode Triwulan I Tahun 2020 belum terlalu banyak terdampak, karena pandemi Covid-19 baru 'menyerang' pada bulan Maret 2020. Sampai dengan akhir Maret 2020, secara total Belanja K/L terealisasi sebesar 16,6%, melebihi dari target triwulan I sebesar 15%. Meskipun demikian, perlu diperhatikan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang realisasinya relatif masih rendah. Diperkirakan, dampak Covid-19 ini baru akan cukup terasa pada Triwulan II (April-Juni) hingga akhir tahun 2020. Hal ini ditandai dengan

adanya penyesuaian pagu belanja (penghematan anggaran) dan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, untuk Belanja Infrastruktur, juga telah terdapat beberapa proyek prioritas yang mengalami penyesuaian, diantaranya adalah pembangunan Bendungan Sidan senilai Rp262,85 Miliar yang dilakukan penghematan sebesar Rp93,30 Miliar dan pembangunan Bendungan Tamblang senilai Rp204,06 Miliar dilakukan penghematan sebesar Rp131,39 Miliar.

Selain itu, untuk alokasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga telah dilakukan penyesuaian dalam rangka fokus pada penanganan Covid-19. Secara total. Alokasi TKDD di Provinsi Bali yang semula Rp12,24 Triliun turun sebesar 10,25% menjadi sebesar Rp10,99 Triliun. Selain Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami penurunan sebesar Rp711 Miliar (9,5%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan komponen yang mengalami koreksi paling besar, yaitu sebesar Rp450,8 Miliar atau 51,1% dari alokasi pada awal tahun. Tentunya hal ini akan berdampak cukup besar bagi pembangunan di Bali mengingat DAK Fisik digunakan untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik. Sedangkan untuk Dana Desa hanya terkoreksi sebesar Rp6,87 Miliar atau 1,04% saja, akan tetapi terdapat perubahan kebijakan dalam penyalurannya. Terdapat pula alokasi TKDD yang mengalami peningkatan, yaitu untuk komponen Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, yang diharapkan dapat menjadi insentif bagi daerah untuk menggerakkan perekonomian.

Pada akhirnya, meskipun dampak Covid-19 di Provinsi Bali tidak dapat terelakkan, akan tetapi, diharapkan pandemi ini dapat segera diatasi dengan berbagai kebijakan, diantaranya melalui kebijakan *refocusing* anggaran dan insentif-insentif lainnya. Apabila pandemi ini dapat segera diatasi, maka Pemerintah dapat berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal kembali seperti sedia kala.

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I
Jl. Dr. Kusuma Atmaja Renon Denpasar 80235
Telp. (0361) 235051 ; Fax : (0361) 222844
Email : kanwildjpbbali@kemenkeu.go.id
Website : www.kanwilbali.djpbn.kemenkeu.go.id

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI